



## Teologi Politik Gereja: Menemukan dan Memancarkan Tritugas Gereja dalam Pilkada dan Pilpres

Hasahatan Hutahaeen  
Sekolah Tinggi Teologi Sumatera Utara  
[hasea2014@gmail.com](mailto:hasea2014@gmail.com)

**Abstract:** *This research was conducted to find the attitude of the church in responding to the practical politics around the church. Because it leads the church to determine its position in siding with one party or one particular candidate. Or the church is just a spectator in the democratic party at the National, Provincial, and maybe Regency/City levels. The research uses a qualitative approach by searching literature and field facts where the church responds to the phenomenon of democracy, especially in Indonesia. The results of the study show the importance of the church in educating its members about the rights and obligations as voice owners in a democratic system. The church should take on a role as an educator on the practice of democracy that is clean, honest, and with a national perspective based on the fear of God. The Bible teaches the church to direct one of its three vocations to politics. To create a democratic system for the welfare of the people. Churches that stay away from the political realm in the sense of education, counseling and coaching to members of the congregation do not yet understand the true meaning of politics. The guidance of the members of the congregation in their position as representatives of the people at the district/city, provincial or national level as well as the executive should be provided in a pattern that is suitable for them both in terms of time, capacity, and involvement in the church.*

**Keywords:** *church, church politics, democracy, political theology*

**Abstrak:** Penelitian ini dilakukan untuk menemukan sikap gereja dalam merespons politik praktis yang ada di sekitar gereja. Karena menuntun gereja untuk menentukan sikap dalam berpihak kepada salah satu partai atau kepada salah satu calon tertentu. Atau gereja hanya menjadi penonton dalam pesta demokrasi tingkat Nasional, Provinsi dan mungkin tingkat Kabupaten/Kota. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan penelusuran literatur serta fakta lapangan dimana gereja merespons fenomena demokrasi khususnya di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan pentingnya gereja memberi edukasi warga jemaat tentang hak dan kewajiban sebagai pemilik suara dalam satu sistem demokrasi. Gereja hendaknya mengambil peran sebagai penyuluh terhadap praktik demokrasi yang bersih, jujur dan berwawasan kebangsaan yang didasarkan takut kepada Tuhan. Alkitab mengajarkan gereja mengarahkan salah satu tri tugas panggilannya kepada bidang politik. Supaya tercipta sistem demokrasi yang mensejahterahkan orang banyak. Gereja yang menjauhi ranah politik dalam arti edukasi, penyuluhan dan pembinaan kepada warga jemaat belum memahami arti politik sesungguhnya. Pembinaan terhadap warga jemaat dalam posisinya sebagai wakil rakyat di tingkat kabupaten/kota, provinsi atau nasional serta eksekutif hendaknya diberikan dengan pola yang sesuai bagi mereka baik dari sisi waktu, kapasitas dan keterlibatannya di gereja.

**Kata kunci:** demokrasi, gereja, teologi politik, politik gereja

## 1. Pendahuluan

Sabtu 25 Januari 2014 lalu ketika mengikuti Syukuran Awal tahun 2014 PGI-WSU di Medan, mencermati dan tertarik atas diskusi demi diskusi termasuk kata-kata sambutan dari beberapa orang mewakili gereja, tokoh masyarakat dan undangan. Dalam acara tersebut peserta menyimak satu bagian yang penting dalam pertemuan yaitu topik diskusi “peran dan tanggung jawab gereja terhadap tahun politik 2014 Indonesia” dengan *keynote speaker* Dr. RE. Nainggolan, MM. Dalam catatan dan penilaian penulis, PGI-WSU memberi diskusi segar sesuai kebutuhan jemaat sekarang ini. Sejatinya bukan hanya di SUMUT namun kebutuhan jemaat di Indonesia menghadapi Pileg dan Pilpres 2014. Karena itu acara tersebut patut diapresiasi sebab sebelumnya baik dalam Pilgubsu dan Pileg-Pilpres lima tahun lalu acara serupa tidak diselenggarakan. Diskusi-diskusi serupa juga dilakukan di banyak tempat, diantaranya di Jakarta dengan Prof Azyumardi Azra sebagai pembicara. Azyumardi Azra menyatakan bahwa gerakan kekerasan verbal dan fisik mengatas namakan agama untuk kepentingan politik tidak dapat disangkal lagi.<sup>1</sup> Bahkan memunculkan fanatisme dalam agama-agama tertentu berangkat dari faham politik yang dianut.<sup>2</sup> Konflik sosial dan perubahan tatanan akibat dari hal itu telah lama diselidiki oleh Coser. Yang melihat perubahan-perubahan muncul akibat terjadinya konflik horizontal yang diawali perbedaan pilihan.<sup>3</sup> Sebab itu peneliti melihat perlunya edukasi keagamaan kepada penganutnya demi menghindari fanatisme politis berlabel agama menjelang dan pasca Pilpres atau Pilkada. Pada pemilihan presiden<sup>4</sup> dan pemilihan *legislative* pada tahun 2019<sup>5</sup> penyelenggaraannya telah jauh lebih baik dan demokratis. Dengan catatan perlu edukasi dan komitmen kepada pemilih pemula agar tidak mudah diombang-ambingkan.

Mencermati diskusi politik dalam acara itu, menurut hemat saya belum memberikan arahan yang jelas dan poin-poin rekomendasi nyata. Meski *keynote speaker* telah memaparkan makalahnya dalam diskusi itu, tampaknya bagi peserta yang

<sup>1</sup> Azyumardi Azra, “Pemerintah Harus Tangkal Sektarianisme,” *Satu Harapan*, 2014.

<sup>2</sup> Silvia Bolgherini, “Participation,” in *Hyperpolitics: An Interactive Dictionary of Political Science Concepts*, ed. Mauro Calise and Theodore J Lowi (Chicago: University of Chicago Press, 2010), 272.

<sup>3</sup> Lewis A Coser, “Social Conflict and the Theory of Social Change,” *The British Journal of Sociology* 8, no. 3 (1957): 199, [https://www.csun.edu/~snk1966/Lewis A Coser Social Conflict and the Theory of Social Change.pdf](https://www.csun.edu/~snk1966/Lewis%20A%20Coser%20Social%20Conflict%20and%20the%20Theory%20of%20Social%20Change.pdf).

<sup>4</sup> Baca. R Siti Zuhro, “Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019,” *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 1 (2019): 69–81, <http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/782/541>.

<sup>5</sup> Achmad Fachrudin, “Menyelamatkan Pemilih Pemula,” *Detiknews.Com*, 2018.

mengikutinya belum sepenuhnya mengerti dan menerima konsepsi yang ditawarkan. Hal bisa dipahami sebab peserta diskusi terdiri dari berbagai latar belakang dan mewakili berbagai Gereja/Lembaga di SUMUT. Bagaimana hal ihwal posisi teologi gereja terhadap politik di tanah air?<sup>6</sup> Secara singkat pengertian teologi politik gereja disini adalah satu kajian dari gerakan dan keterlibatan gereja terhadap teologi dalam ranah politik serta upayanya dalam menghadapi persoalan-persoalan kekuasaan pemerintahan pada masa tertentu.<sup>7</sup>

Sekaitan dengan topik diskusi dalam Syukuran Awal Tahun PGI-WSU tersebut, penulis tertarik untuk memberi sumbang pikiran dari penelusuran sejarah Gereja dan kebenaran Kitab Suci. Tulisan ini bertujuan untuk menyajikan kebenaran Firman Tuhan perihal peran dan tanggung jawab Gereja dalam kancah politik di Indonesia.<sup>8</sup> Tidak hanya dalam menghadapi Pileg-Pilpres 2014 dan 2019 atau 2024., semoga dapat dipertimbangkan untuk berbagai *event* dengan latar dan keperluan perpolitikan di Indonesia. Oleh karena tulisan ini berangkat dari pengamatan<sup>9</sup> diskusi Syukuran Awal Tahun PGI-WSU tersebut, maka dalam tulisan ini tidak dapat dihindarkan mengutip pendapat-pendapat yang mencuat dalam diskusi. Pendapat-pendapat itu menjadi pijakan penulis dalam berinteraksi (menulis) hingga terangkum dengan jelas.

### ***Awal Keterkaitan Politik dan Agama (Gereja)***

Dalam Perjanjian Lama, bisa ditemukan pola pemerintahan yang dijalankan para Nabi, Hakim atau Raja. Sistem itu biasa dikenal dengan teokrasi. Namun baik pemerintahan Nabi, Hakim atau Raja, ketiganya memberi pelajaran bagi kita bahwa tugas pemerintah terhadap rakyatnya dapat kita rangkum dalam empat poin: (1) memberi kebebasan dari penjajahan dan menjamin rasa aman bagi segenap rakyat. Hal ini dapat kita baca dalam berbagai dalam Hakim-hakim atau kitab Nabi besar maupun kecil. (2) Mengusahakan kebutuhan sehari-hari meskipun mengutamakan dalam lingkungan istana raja. Kisah dalam Keluaran jelas memberi nuansa demikian. Dengan bantuan kemampuan manajerial Yusuf akhirnya Raja bisa menjamin ketersediaan pangan bagi rakyatnya saat

---

<sup>6</sup> Alter I Wowor, "Teologi Dan Etika Politik Dalam Gereja Di Zaman Post-Modern," *BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 1, no. 1 (2018): 114, <https://www.jurnalbia.com/index.php/bia/article/view/23/9>.

<sup>7</sup> Band. Rasid Rachman, "Teologi Sosial-Politik-Budaya," in *Teologi-Teologi Kontemporer* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018), 119.

<sup>8</sup> Adolf Bastian Simamora, "POLITIK MENURUT ALKITAB DAN IMPLIKASINYA BAGI PERAN GEREJA DALAM PUSARAN POLITIK DI INDONESIA," *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama* 2, no. 1 (2019): 13, <https://jurnalvow.sttwmi.ac.id/index.php/jvow/article/view/16/16>.

<sup>9</sup> Hamid Patilima, *Metode Penelitian Kualitatif*, Kelima. (Jakarta: Cv. ALFABETA, 2016), 63-65.

musim kering tiba. (3) Menolong masyarakat dalam hubungannya dengan Allah pencipta seperti masyarakat Niniwe. Bahkan kitab Ezra dan Nehemia memberi pengetahuan dan informasi bagi pembaca bahwa transformasi total dalam bangunan infrastruktur kota dan iman orang Israel sedang diusahakan hingga terjadi kebangunan rohani yang besar di tengah orang Israel kala itu. Dan (4) tak kalah pentingnya baik pemerintahan Nabi, Hakim atau Raja bertanggung jawab dalam menimbulkan rasa patriotisme, cinta tanah air warganya kepada Negara dan pemerintahan yang sedang berkuasa. Seperti melibatkan rakyat dalam pembangunan rumah Allah atau pemilihan Raja.

Perjanjian Baru juga memberikan pelajaran penting tentang pertautan agama (Gereja) dengan politik. Dapat dikatakan gerakan Yesus sebagai *double movement: revival* dan *sosial movement*. Ditambah konteks sosial yang rusak pada zaman itu, di mana terjadi ketimpangan sosial antara si kaya dan si miskin. Dalam suasana demikian Tuhan Yesus memproklamasikan agenda kebangunan rohani dan perjuangan sosial, seperti terdapat dalam Lukas 4: 18-19, "Roh Tuhan ada padaKu oleh sebab Ia telah mengurapi Aku, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin; dan Ia telah mengutus Aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang."

Dalam seluruh pelayanan dan pengajaran Yesus, orang miskin menjadi fokus pelayanan serta diberi optimisme. Kaum miskin biasanya terkait dengan kemiskinan iman dus materi.<sup>10</sup> Mereka miskin dalam iman sebab kebanyakan pelayanan diberikan oleh pemuka agama dengan memandang muka dan harta kekayaan. Bagi yang taraf ekonomi keatas, akan diberi apresiasi, sedang ekonomi rendah atau miskin menjadi jemaat dengan penatalayanan kelas kedua. Namun Yesus menawarkan Kerajaan sorga kepada orang miskin (masyarakat) yang merindukan keadilan dengan penuh perjuangan.<sup>11</sup> Orang-orang miskin sama seperti orang kaya dihadapan Allah yang kebutuhan utamanya adalah jaminan hidup kekal. Orang kaya sering dikejutkan akan sikap Yesus yang kadang kala *tak acuh* terhadap materi. Kepada orang kaya, Yesus katakan "Juallah segala yang kaumiliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga..." (Mat.18:22). Gambaran singkat ini

---

<sup>10</sup> Herry Susanto, "Panggilan Sosial Gereja Berdasarkan Pelayanan Yesus Dalam Lukas 4:18-19: Sebuah Upaya Merevitalisasi Pelayanan Gereja," *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 19, no. 1 (2020): 98, <https://ojs.seabs.ac.id/index.php/Veritas/article/view/356>.

<sup>11</sup> Simamora, "POLITIK MENURUT ALKITAB DAN IMPLIKASINYA BAGI PERAN GEREJA DALAM PUSARAN POLITIK DI INDONESIA," 2.

memberi gambaran kepada kita bahwa Gereja harus hadir ditengah masyarakat, untuk membawa pelayanan yang konprehensif dalam kehidupan nyata bahkan kehidupan setelah kematian. Dalam hal ini tepat apa yang dikatakan salah seorang peserta Syukuran Awal Tahun PGI-WSU 2014, bahwa kerinduan kehadiran Gereja di tengah dunia adalah guna memberi pelayanan dan pemerataan keadilan kepada banyak orang. Namun sayangnya, politisi- dalam hal ini diwakili para legislative, telah dipandang oleh banyak orang bahwa keberadaannya hanya mewakili partai politik pengusungnya. Sebab itu menurut salah satu pimpinan gereja yang hadir dalam acara itu, upaya mencari dukungan kepada gereja akan memberikan posisi sulit bagi pemimpin (gembala) gereja. Satu sisi Caleg yang meminta dukungan adalah jemaatnya, tapi di sisi lain sang gembala tahu bahwa posisinya di Badan Legislatif Negara, acapkali menjadi perwakilan dari partai politik yang mengusung suara partai, bukan mewakili jemaat yang memilihnya.

Dalam banyak literature politik, politik selalu dikaitkan dengan ‘pembuatan kebijakan’ (*policy making*) untuk dan demi orang banyak. Seorang penulis bernama Harrold Laswell mendefenisikan, politik adalah “*who gets what, when, and how*”. Dengan demikian maka politik itu terkait kepada setidaknya pertama, pembuat kebijakan, kedua keuntungan dan manfaat pembuatan kebijakan dan ketiga kesempatan membuat kebijakan. Karena semua orang meski menginginkan menjadi *policy maker*, tapi tidak mendapat kesempatan yang sama, yang sangat diinginkan. Dengan *mood* demikian, maka dapat dilanjutkan lagi bahwa politik terkait juga dengan kekuasaan dan seni memerankan kekuasaan untuk mengikuti kehendak politikus dan bahkan sekumpulan politikus (dalam partai politik). DD. Rapar, dalam bukunya menyatakan menerangkan bahwa politik itu merujuk pada *politikos* dan *politheia* (bhs. Yunani) yang mencakup Negara dan warga Negara. Dalam tugas dan maksud menjadikan pembuatan kebijakan sebagai sarana untuk menyejahterahkan orang banyak dan menolong orang banyak untuk mencapai tujuan-tujuan mereka dalam kerangka bernegara dan bangsa dalam payung pemerintahan. Alim memberikan tanggapan bahwa politik adalah ruang di mana tujuan-tujuan untuk kebaikan bersama dipetaruhkan.<sup>12</sup> Karena itu dapat ditarik satu kesimpulan dari paparan diatas bahwa tujuan politik dalam mengambil, merancang kebijakan adalah satu tugas yang mulia karena politik adalah satu instrument bagi sekelompok orang untuk membawa orang lain yang lebih banyak lagi menikmati

---

<sup>12</sup> Syahirul Alim, “Membangun Toleransi Politik,” *Kompasiana.Com* (Jakarta, April 20, 2020), <https://www.kompasiana.com/syahirulalimuzer/589c252920afbd31190aff/membangun-toleransi-politik>.

kehidupan yang bermartabat melalui kebijakan-kebijakan populis untuk kepentingan bersama dan kemaslahatan orang banyak. Tindakan membiarkan ketidakadilan, kekerasan dan diam melihat berbagai penindasan dalam etika politik Kristen bagi Kristianto adalah satu “penindasan suara hati nurani.”<sup>13</sup>

Namun apa lacur karena polotik dalam usianya yang sama dengan usia manusia, telah dimanipulasi sekelompok orang dalam wadah-wadah partai politik telah menyesatkan banyak orang (jemaat) untuk kepentingan sesaat dan sekelompok tertentu. Hal ini tentu yang tercium oleh para pemimpin agama (termasuk gereja) sehingga tidak mudah goyah untuk memberi dukungan kepada golongan politik tertentu termasuk mendorong jemaat dalam menjatuhkan pilihan kepada caleg tertentu untuk duduk di lembaga legislatif. Hal ini dapat menimbulkan pertikaian internal Gereja tentunya. Yaitu manakala Gereja mendukung Caleg A dengan mengarahkan jemaat memilih A sedangkan digerejanya (baik tingkat jemaat lokal, resort maupun distrik) ada semisal 5-7 caleg bahkan di dapil yang sama. Hal ini tampaknya sedang dipikirkan (strateginya) oleh salah satu sinode gereja tertentu yang menghadiri Syukuran Awal Tahun PGI-WSU. Lewis A. Coser memberikan gambaran bibit konflik, dengan menulis, “konflik biasanya merujuk pada keadaan dimana seseorang atau suatu kelompok dengan identitas yang jelas terlibat pertentangan secara sadar dengan satu atau lebih kelompok lain, karena kelompok-kelompok ini mengejar atau berusaha mencapai tujuan...serta dalam prosesnya seringkali ditandai oleh adanya upaya dari masing-masing pihak untuk saling menetralisasi, menciderai, hingga mengeliminasi posisi/eksistensi rival/lawannya.”<sup>14</sup> Dengan mengarahkan suara dari jemaat gereja tertentu kepada Caleg A, dengan sendirinya melakukan eliminasi terhadap eksistensi rival Caleg B., C., D., dan seterusnya. Ironinya adalah jemaat gereja yang sama plus dikomandoi oleh pendeta/rohaniawan. Bayangkan apa yang terjadi jika hal ini terjadi di sinode gereja lain dan juga dilakukan oleh kelompok agama lain dan kelompok masyarakat tertentu lainnya. Netralitas dalam agama yang sama tidak terjadi sebab agama telah menjadi pelaku politik (*partisan politics*) dan terlibat nyata.<sup>15</sup> Homilia sebagai sarana penyebaran Firman Allah akan dipenuhi pesan-pesan sponsor dari partai

---

<sup>13</sup> Paulus Eko Kristianto, “Merumuskan Etika Politik Kristen Dalam Era Gangguan Terorisme Di Indonesia,” *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 3, no. 2 (2019): 233, <https://sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/dunamis/article/view/186/150>.

<sup>14</sup> Coser, “Social Conflict and the Theory of Social Change,” 200.

<sup>15</sup> Francis E. Rourke, “Responsiveness and Neutral Competence in American Bureaucracy,” in *Democracy, Bureaucracy, and the Study of Administration*, ed. Camilla Stivers, 1st Editio. (Routledge, 2019), 4.

politik. Lingkaran spiral ini tentunya menjadi bibit unggul untuk panen konflik komunal yang lebih besar lagi dalam tataran nasional.

Eka Saputra dalam buku, *Dinamika Politik Lokal*, memberikan penjelasan bahwa tingkat konflik lebih besar dalam tataran Negara dengan sederhana. Menurut Eka Saputra, konflik yang terjadi pada level internal atau dalam Negara disebabkan oleh dua hal, yaitu persoalan identitas dan ketidakadilan struktural.<sup>16</sup> Pengertian “konflik identitas” adalah konflik yang bersumber dari mobilisasi orang dalam kelompok komunal yang didasarkan atas ras, agama, kultur, bahasa dan lainnya. Konflik terjadi manakala ada pihak-pihak yang memanfaatkan, memanipulasi, dan mengeksploitasi identitas dalam konflik untuk kepentingan diri dan kelompoknya. Hal ini sering terjadi dalam Pemilukada-Pemilukada di beberapa daerah di tanah air. Bahkan dampak paling buruk ada penyesalan dari masyarakat karena memilih Mr. X sebab ketika menjelang pemilihan telah dimobilisir oleh partai tertentu sekalipun mereka ibarat memilih kucing dalam karung. Setelah Mr. X terpilih, baru tampak bagi pemilih bahwa pilihan mereka sesat sebab yang dipilih adalah penyesat. Pejabat yang tidak mengerti menata Negara dalam tingkatan kabupaten-Kota atau Propinsi sehingga banyak kebijakan dan gerak pemerintahan hanya mengacu demi dan untuk golongan tertentu. Dalam politik, seperti telah diungkap diatas bahwa ‘pembuatan kebijakan’ (*policy making*) adalah untuk dan demi orang banyak. Jika ada dua kelompok dalam komunitas yang sama memperebutkan hal yang sama, itu satu pertanda bahwa konflik sedang berlangsung.<sup>17</sup>

Karena itu tugas agama-agama adalah melakukan politik agama, bukan politisasi agama. Politik agama adalah politik kenabian (*prophetic politics*) bukan politik partisan (*partisan politics*). Politik agama adalah politik moral yang mengeluarkan suara kenabian termasuk melakukan kritik kepada pemerintah dan pejabat publik yang berkuasa, yang tidak menjalankan tugasnya dengan bertanggung jawab. Dalam paradigma politik agama yaitu politik kenabian (*prophetic politics*), adalah tugas gereja membawa berita Injil kepada semua orang. Yang dengannya, manusia diperdamaikan dengan Allah penciptanya. Salah satu wujud perdamaian dengan Allah adalah terciptanya hasrat berdamai dan mengasihi orang lain. Maka tugas menyebarkan damai menjadi panggilan gereja kepada semua orang.

Sedangkan gerakan politisasi agama adalah politik partisan, yang dilakukan dengan mengeksploitasi agama, menjadikan agama sebagai kendaraan politik untuk

---

<sup>16</sup> Kurniawan Eka Saputra, *Dinamika Politik Lokal* (Bandung: PT Lontar Digital Asia, 2020), 121.

<sup>17</sup> Ramlan Surbakti and Hari Fitrianto, *Ide-Ide Politik Alternatif Dan Globalisasi Di Negara Berkembang* (Surabaya: CV. Revka Prima Media, 2012), 149.

merebut kekuasaan politik. Biasanya politik agama atau politik sektarianisme seperti ini diwujudkan dengan pembentukan partai agama atau partai politik yang berbasis (*grass roots*) agama. Ini berbahaya. Sejarah mencatat bahwa apabila agama mengambil alih kekuasaan negara, maka yang terjadi bukan proses demokratisasi dan penghargaan hak-hak azasi, tetapi justru pemerintah yang tirani yang tidak menghargai prinsip-prinsip toleransi. Politisasi gereja adalah segala upaya yang dilakukan dengan mengeksploitasi gereja untuk memperoleh kekuasaan atau keuntungan politik tertentu. Politisasi gereja bisa dilakukan dengan atau tanpa melalui partai politik berbasis gereja. Politisi Kristen (dari berbagai partai politik) yang mencalonkan diri sebagai anggota legislatif atau menjadi pejabat publik (Presiden, Gubernur, Bupati dll) dengan menggunakan kendaraan gereja seperti kampanye dalam gereja, menggunakan simbol-simbol gereja dan mobilisasi warga gereja, adalah termasuk praktek politisasi gereja yang harus dicermati dan diwaspadai. Praktek politisasi agama bisa juga dilakukan dengan membentuk partai agama atau partai berbasis Kristen. Sulit membayangkan jika hal ini dilakukan dengan vulgar oleh gereja atau Gembala jemaat. Politisasi yang identik dengan menggapai kekuasaan rawan dan naif jika bebas dari penyalahgunaan kekuasaan bila hal ini terjadi dalam gereja. Gembala akan menggunakan posisinya untuk memengaruhi jemaat. Di sisi lain jemaat pertama; jemaat telah menentukan hak politiknya dan kedua jemaat sesungguhnya merindukan taburan firman TUHAN yang murni dari Gembala sebagai pelita dan terang dalam hidup keseharian. Bukan pengarahan politisasi. Dictum Lord Acton berbunyi, "*power tends to corrupt, absolute power corrupt absolutely.*"

Diskusi politik dalam Syukuran Awal Tahun 2014 PGI-WSU, RE. Nainggolan mengutip J. Philip Wogoman tentang tujuh tingkat keterlibatan gereja. Patut diapresiasi kepada *keynote speaker*, karena dalam paparannya tidak mengarahkan peserta diskusi untuk memilih salah satu tingkat dari tujuh tingkat keterlibatan gereja dalam politik dari buku "*Christian Perspective on Politics.*" Sebagai interaksi, berikut akan kita lihat bagaimana versi penulis mengenai relasi gereja terhadap politik.

Secara umum terdapat tiga pendapat mengenai relasi Gereja dengan politik. *Pertama*, mereka yang a-politik (anti-politik), yang menganggap politik sebagai urusan duniawi yang kotor yang tidak perlu dicampuri oleh gereja, sebab gereja adalah lembaga yang ilahi yang tidak perlu mengurus masalah-masalah duniawi. *Kedua*, adalah sikap yang melihat Gereja sebagai kekuatan politik yang dapat dijadikan sebagai basis politik dalam rangka merebut keuntungan atau kekuasaan politik. Pandangan ini biasa disebut sebagai praktek politisasi gereja. Pandangan *ketiga*, adalah gereja harus melakukan politik moral (*moral politic*) sebagai bidang pelayanannya. Pandangan ketiga ini berpendapat bahwa Gereja tidak boleh masa bodoh dengan masalah-masalah politik,

dan juga tidak boleh masuk dalam politik praktis, yaitu membentuk kekuatan politik untuk merebut kekuasaan politik. Politik agama (baca: Gereja) adalah politik kenabian (*prophetic politics*) bukan politik partisan (*partisan politics*). Politik kenabian adalah politik moral yang senantiasa menyuarakan kebenaran: menyatakan benar kepada yang benar dan salah kepada yang salah. Jenis relasi ketiga ini menjadi poin penekanan Sekum PGI ketika diminta memberikan kata sambutan dalam Syukuran Awal Tahun 2014 PGI-WSU. Politik moral (politik kenabian) harus senantiasa melakukan kritik kepada para penguasa dan pemerintah yang berkuasa, agar mereka tidak melalaikan tugas dan tanggung jawabnya yang utama yaitu memberikan kesejahteraan dan rasa aman kepada seluruh warganya. Dalam Yer.29:7 tertulis, "Usahakanlah kesejahteraan kota ke mana kamu Aku buang, dan berdoalah untuk kota itu kepada Tuhan, sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraanmu."

Dalam bidang Politik, Yesus adalah contoh dalam politik kenabian, dengan politik moral yang melakukan gerakan untuk memperbaiki kemerosotan di tengah masyarakat. Phelps memaparkan dalam bukunya<sup>18</sup> bahwa Yesus tidak pernah melakukan politik praktis untuk merebut kekuasaan. Sebaliknya DIA menghindari politik identitas. Yang dilakukan Yesus adalah membangun landasan moral demi menggapai kekuasaan yang baik melalui pengajaran maupun melalui tindakan yang digerakkan demi kesejahteraan orang banyak.<sup>19</sup> Baik itu untuk kesembuhan jasmani maupun pengampunan dosa manusia. Politisasi agama juga tidak sesuai dengan semangat kebangkitan nasional, misalnya semangat Sumpah Pemuda, cita-cita kemerdekaan dan perjuangan reformasi. Indonesia adalah sebuah negara Pancasila, bukan sekuler, dan bukan teokrasi,<sup>20</sup> tetapi negara yang majemuk yang menghargai toleransi dan menjunjung hak-hak azasi.

## 2. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan penelusuran literature.<sup>21</sup> Yakni menyelidiki satu peristiwa baik perbuatan maupun dalam bentuk tulisan untuk menemukan fakta yang tepat. Sebagai penelitian kualitatif, peneliti dapat bertolak dari suatu teori yang telah diakui keberadaannya dan dapat disusun kembali dalam satu

---

<sup>18</sup> Hollis Phelps, *Jesus and the Politics of Mammon (Critical Theory and Biblical Studies)* (New York: Cascade Books, 2019).

<sup>19</sup> Ibid., 59.

<sup>20</sup> Febri Hijroh Mukhlis, "Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beragama," *FIKRAH* 4, no. 2 (2016): 180, <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/fikrah/article/view/1885/pdf>.

<sup>21</sup> Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kepustakaan*, Revisi. (Malang: Literasi Nusantara, 2020), 7.

penelitian sesuai data yang ada.<sup>22</sup> Karena itu dalam penyusunan tulisan pada penelitian ini akan dilakukan pertama, penelusuran literature terhadap bidang politik dan yang berhubungan dengan gereja, serta kegaitan gereja terhadap fenomena adanya berbagai Pilkada serta Pilpres. Kedua menelaah teori yang ada dari literature terkait dengan maksud mencari posisi sikap gereja yang sebenarnya terhadapnya. Ketiga, memberikan analisis tri tugas gereja terhadap situasi politik di Nusantara yang mempunyai singgungan dengan gereja serta jemaat-Nya. Analisa yang dimaksud mengikuti teori Amir Hamzah bahwa dalam penelitian kepustakaan analisa terhadap suatu peristiwa tujuannya untuk menemukan konsep atau teori yang terkandung di dalamnya. Dimana konsep dipahami sebagai gagasan atau ide yang mempunyai makna dan sempurna terhadap satu objek.<sup>23</sup> Pada bagian akhir akan dipaparkan simpulan dari kajian terhadap fakta yang ada dan analisa tulisan dan peristiwa yang dipaparkan.

### **3. Hasil dan Pembahasan**

Dalam lingkungan gereja baik gereja lokal maupun perkumpulan-perkumpulannya (misalnya: PGI, PPGGLII, GBI, GMAHK, dll) terdapat varian pendapat terhadap peran gereja dan pengertian mereka terhadap politik. Rantung menyatakan ada satu masa Gereja terjerumus pada posisi sebagai pelayan politik dalam arti dikendalikan.<sup>24</sup> Politik oleh sebagian orang dimengerti sebagai alat untuk meraih kekuasaan dan dengannya seseorang bisa memperoleh banyak hak dan kebebasan bahkan hingga beroleh kekayaan materi. Karena itu gereja hendaknya dijauhkan dari berbagai kegiatan politik baik sikap maupun praktisnya. Jemaat dilarang berpolitik termasuk para rohaniawan dan dengan usaha-usaha terukur mengarahkan program-program gereja agar jauh dari nuansa politik atau mencerdaskan jemaat dalam bidang politik. Sebagian gereja menerima dan mengerti politik sebagai hak azasi jemaat bahkan menerimanya sebagai satu panggilan bagi gereja. Mereka merujuk kepada pendapat Marthin Luther bahwa orang percaya/gereja harus tunduk kepada pemerintah dan taat terhadap hukum-hukumnya. Hal ini menyangkut dengan prinsip etika politik yang dianut Luther sebagai *defeatist* (mengalah) dan *quietist* (pasif, menolak aksi) terhadap berbagai aksi politis pemerintah. Sikap ini dianggap sebagai jalan terbaik bagi kelangsungan perjalanan

---

<sup>22</sup> Yanuar Ikbar, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif* (Bandung: Refika Aditama, 2014), 117.

<sup>23</sup> Amir Hamzah, *Metode Penelitian Kualitatif* (Malang: Literasi Nusantara, 2019), 270.

<sup>24</sup> Dr. Djoys Anneke Rantung, "TEOLOGI POLITIK UNTUK KEADILAN Respons Teologis Gereja Di Tengah Menguatnya Politik Identitas," *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama* 2, no. 1 (2019): 4, <https://jurnalvow.sttwmi.ac.id/index.php/jvow/article/view/21>.

gereja dan Negara untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini sesuai dengan asal-muasal politik, "mensejahterahkan orang."<sup>25</sup>

Kaum Calvinis seperti yang dituangkan dalam buku *The Basic Ideals of Calvinism*<sup>26</sup> menandakan satu pergumulan yang amat penting adalah bagaimana caranya agar kehendak Allah yang didapati dalam Alkitab dapat diketahui dan diterapkan oleh tiap pejabat Negara. Karena itu poin penting bagi calvinisme adalah agar tiap orang yang menjadi pelayan publik hendaknya mengetahui bahwa apa yang Allah jabatan diberikan Allah kepada mereka untuk memuliakanNya.<sup>27</sup> Ini tentu berangkat dari keyakinan bahwa dalam Alkitab, Allah telah memberikan arahan yang jelas bagi semua orang untuk menjadi berkat dan membawa damai bagi dunia. Dimanapun posisi seseorang, tentu dituntut untuk menjadi rasi bagi warga lainnya, sama seperti keinginan yang difirmankanNya, hendaklah menjadi seperti terang dan garam dunia (Mat.5:13-15).

Selanjutnya dalam buku tersebut dinyatakan batasan kewajiban gereja kepada Negara. Gereja berhak memberikan pengaruh yang tidak langsung atas Negara, dengan jalan memengaruhi hati nurani warga dan pejabat. Sebab apabila hati nurani pejabat dan warga Negara telah meresapi pesan-pesan *biblical* dengan murni, maka Negara akan semakin kuat dan tiap warga Negara akan kian taat juga kepada hukum Negara sama seperti ketaatannya kepada hukum Allah dan moral. Sebab itulah maka gereja harus; pertama memberitakan Injil dengan tekun dan memaparkan prinsip-prinsip firman Allah dari penggalan yang ketat dan benar untuk menuntun jemaat memasuki peran dan penerapan firman dengan benar dalam semua aspek kehidupan, termasuk tentunya bidang politik dan pelayanan publik.<sup>28</sup> Kedua, para ilmuwan Kristen dan perguruan-perguruan tinggi harus terus berupaya dalam mengembangkan dan membagikan prinsip-prinsip Alkitab kepada banyak orang (rumusan yang hampir sama dalam Tridharma Perguruan Tinggi). Upaya ini harus terus dilakukan secara regular, berkesinambungan dan terukur karena para ilmuwan Kristen dan perguruan-perguruan tinggi (Kristen khususnya) adalah bagian tak terpisahkan dari pilar gereja yang

---

<sup>25</sup> Wasisto Raharjo Jati, "AGAMA DAN POLITIK: TEOLOGI PEMBEBASAN SEBAGAI ARENA PROFETISASI AGAMA," *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 1 (2014): 135, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/view/262> Jati memaparkan bahwa dalam Islam kecenderungan untuk mengaburkan maksud dan tujuan politik secara benar telah terjadi dengan munculnya politik identitas yang kian marak atas nama agama.

<sup>26</sup> H. Henry Meeter, *The Basic Ideas of Calvinism* (Grand Rapid Michigan: Baker Books, 1990).

<sup>27</sup> H. Henry Meeter, *Pandangan-Pandangan Dasar Calvinisme*, ed. Irwan Tjulianto (Surabaya: Momentum, 2009), 155–156.

<sup>28</sup> Saut Hamonangan Sirait, *Politik Kristen Di Indonesia Suatu Tinjauan Etis* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012), 69.

menghadirkan “syalom” di dunia. Bukankah ilmuwan Kristen dan perguruan tinggi Kristen sering menyatakan diri mendapat panggilan Allah melayani dalam bidang pendidikan untuk memuliakanNya? Prinsip ini didapat dari kata Latin; *gratia Dei, pro Gloria dei* (oleh anugerah Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan).

Satu langkah yang penting dalam mencari partisipasi gereja Indonesia dalam perpolitikan adalah memastikan bahwa gereja “secara sadar memosisikan diri sebagai bagian dari proses demokratisasi”<sup>29</sup> di Indonesia dan gerakan masyarakat sipil (*civil society*). Dalam situasi kemajemukan agama, suku dan denominasi-denominasi dalam tiap agama, serta dalam rangka menyikapi adanya sikap intoleransi dari periode-periode politik sebelumnya, menurut peneliti bagian dari partisipasi politik gereja adalah dengan mengembangkan relasi lintas agama dan komunikasi lintas budaya untuk membangun Indonesia demokratis. Gerakan antar iman dan aliansi nasional lintas etnis (eksternal) dan lintas denominasi gereja (internal) akan menolong bangsa ini membuka sumbatan-sumbatan komunikasi politik secara terstruktur.<sup>30</sup> Masing-masing denominasi harus membuka diri untuk menerima perbedaan dogma, selanjutnya antar pemeluk agama tiba saatnya untuk memahami ajaran agama orang lain agar tidak salah dalam habitus spiritual yang saling memahami dan menerima perbedaan.<sup>31</sup> Menurut peneliti, ini merupakan gerakan yang benar, *elegant* guna menemukan pemimpin sejati dari tengah-tengah masyarakat Indonesia sendiri, yang nasionalis, kesatria, agamais dan berintegritas. Dengan pijakan dan atas tujuan tersebut, maka untuk urusan politik maka gereja penting menyadari *pertama*; dalam politik moral (etis), gereja harus mengupayakan (aktif) pendidikan politik yang rapi, biblis, untuk kemuliaan Tuhan. Dalam ranah ini kegiatan-kegiatan seperti yang dikerjakan PGIW-SU di atas adalah salah satu contoh praktis musiman yang sangat berarti sebagai literasi demokrasi dan politik jemaat. Namun secara regular pola kepemimpinan gereja baik tingkat sinode, distrik, resort hingga jemaat lokal, segera memberi tontonan politik dengan bumbu etika Kristen murni atas dasar kajian alkitab yang bertanggungjawab. Misalnya pemilihan Penatua, Sintua atau Majelis gereja, bahkan hingga kegiatan rutin periodisasi pendeta dalam permutasian yang disusun oleh sinode.

---

<sup>29</sup> Jason A. Mahn, *Becoming a Christian in Christendom: Radical Discipleship and the Way of the Cross in America's "Christian" Culture*, *Becoming A Christian in Christendom: Radical Discipleship and the Way of the Cross in America's "Christian" Culture* (Minneapolis: Fortress Press, 2016).

<sup>30</sup> Katimin Katimin, *Politik Islam Indonesia: Membuka Tabir Perjuangan Islam Ideologis Dalam Sejarah Politik Nasional* (Medan: Perdana Publishing, 2018), 173.

<sup>31</sup> Hasahatan Hutahaean, “Tantangan Teologi Agama-Agama: Suatu Diskursus Model,” *KURIOS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen)* 6, no. 2 (2020): 269, <https://www.sttpb.ac.id/e-journal/index.php/kurios/article/view/136/96>.

Pendidikan politik tentu berbeda dengan berpolitik praktis. Untuk bagian pertama ini bagi Meliala penting untuk mendorong gereja agar memberi atau memengaruhi ajaran politik yang benar di gereja.<sup>32</sup> Anggota-anggota jemaat yang potensial dan yang berperan dalam ranah politik misalnya sebagai pengurus partai hingga mencalonkan diri sebagai anggota legislatif diberi pembekalan secara merata. Upaya serupa dituliskan Gilbert mengangkat kisah Marthin Luther King dengan latar Afrika untuk kemajuan demokrasi di Amerika.<sup>33</sup> King memadukan khotbah dari pemahaman nas Alkitab dengan situasi Negara yang perlu tuntunan gereja untuk pemahaman politik dan demokrasi secara benar. Karena itu, peneliti dalam hal ini menekankan agar para pemberita firman dalam khotbah-khotbahnya jika memang nats yang dikhotbahkan berkenaan dengan ranah politik, maka nats harus diberitakan dari penggalian yang benar untuk menjadi makanan rohani jemaat. Khotbah-khotbah harus jauh dari nuansa kampanye. Karena khotbah adalah pemberitaan firman Tuhan dengan penjelasan yang menonjolkan pemberitaan Kristus.<sup>34</sup> Dengan demikian peran etis gereja terasa kepada semua jemaat yang memiliki rutinitas kepartaian hingga mungkin sedang dalam pencalegan. Namun batasannya dalam hal ini adalah; tidak memberikan dorongan dan bantuan/fasilitas kepada jemaat tertentu (dari partai/dapil) secara sepihak, sehingga tidak menimbulkan prasangka bagi jemaat lain yang berasal dari partai berbeda.

Bagian kedua peran gereja dalam bidang politik adalah politik praktis. Maksudnya? Memberikan sumbangsih riil langsung kepada partai-partai politik yang eksis dengan cara-cara *elegant* sebagai bagian pelayanan gereja dalam perpolitikan di Indonesia. Hal ini bisa diwujudkan dengan mengusulkan (mempersembahkan) jemaat secara langsung untuk dipakai oleh partai politik dalam pengusungan kepada daerah atau anggota *legislative*. Penulis beranggapan bahwa gereja tidak boleh pilih buluh untuk “menyalurkan” jemaatnya kepada partai-partai. Gereja yang melihat jemaat secara real sanggup hidup dan bergelut dalam perpolitikan hendaknya diusulkan kepada semua partai agar dipertimbangkan untuk; menduduki kepengurusan/fungsionaris dalam partai hingga pencantuman dalam DCT (daftar calon tetap). Usul ini tampaknya narsis atau superior bagi pembaca. Namun jika kita merujuk

---

<sup>32</sup> Adrianus Meliala, *Pendampingan Politik* (Jakarta: OBOR, 2014), 60.

<sup>33</sup> Kenyatta R Gilbert, *A Pursued Justice: Black Preaching from the Great Migration to Civil Rights* (Texas: Baylor University Press, 2017), 192.

<sup>34</sup> Mary S Hulst, *Pedoman Khotbah Lengkap: Sepuluh Cara Praktis Untuk Khotbah Yang Lebih Baik* (Jakarta: Waskita Publishing, 2018), 58.

kembali pada tujuan politik untuk kemakmuran banyak orang, bukankah panggilan gereja adalah demi kesejahteraan dunia ini untuk menikmati hadiratNya melalui gerejaNya? Semua jemaat adalah gerejaNya. Sebab gereja bukanlah gedungnya tetapi orang-orang yang ada di dalamnya dimana dalam dirinya telah tertanam iman kepada Yesus Sang Juruselamat dunia.

Batasan bagi bidang kedua ini bagi gereja agar tidak menyimpang adalah tidak memilih atau condong pada satu partai tertentu saja. Karena itu anggota jemaat yang sangat mumpuni dan potensial menjadi politikus sejati diajukan kepada (sejenis proposal) kepada semua partai. Tujuan pengajuan anggota jemaat juga diungkapkan untuk kepentingan semua orang, bukan tujuan pencapaian maksud sinode gereja pengusul. Karena jika anggota jemaat telah diusulkan untuk menjadi caleg atau kepala daerah bahkan Negara, maka yang bersangkutan menjadi milik Negara Indonesia dengan ladang/bidang pelayanan politisi. Anggota jemaat ini akan mengemban amanah untuk mensejahterahkan seluruh orang di Indonesia. Tidak sampai disitu, lebih jauh Rasid menambahkan agar memberi kemerdekaan, keadilan dan kemanusiaan secara aktual dari dosa-dosa politis yang pernah ada dan menjerumuskan masyarakat.<sup>35</sup> Karena itu gereja pengusul harus berbesar hati untuk 'melepas' jemaatnya sebagai tangan Tuhan guna kesejahteraan orang banyak. Hal ini yang dapat kita mengerti ketika membaca dan merenungkan kisah Yusuf di Mesir. *Dus*, secara rutin gereja aktif mendoakan semua partai, anggota legislative dan pemimpin daerah bahkan kepala Negara agar pelayanan mereka kepada Tuhan dalam ranah politik menjadi bagian pemuliaan Allah (*kosmoe teatre gloriae Dei*).

Inilah dua bidang pelayanan gereja dalam bidang politik yang bagi penulis penting untuk gereja laksanakan demi mewujudkan tri tugas gereja. Sekalipun kampanye 2019 telah berlalu dan penetapan capres dan Cawapres 2024 masih lama, kiranya tulisan ini menjadi penting dipertimbangkan untuk perpolitikan Indonesia yang bersih, jujur, berintegritas dan memiliki panggilan jelas dari Allah. Sebab menjadi bagian Negara ini berarti menjadi bagian untuk meningkatkan kualitas hidup bernegara semua warganya. Tanpa pandang asal gereja, denominasi, suku, agama dan partai politik. Adapun partai politik adalah alat konstitusi untuk menjadi bagian menyejahterahkan orang. Gereja sebagai institusi tak jauh berbeda dengannya. Hal ini mulia di mata Allah. Namun sakramen secara murni hanya diberikan oleh Allah kepada manusia melalui gereja, bukan partai, persekutuan atau Lembaga Pelayanan *para-church*. Semoga Tuhan

---

<sup>35</sup> Rachman, "Teologi Sosial-Politik-Budaya," 123.

memberkati Indonesia, menolong warga gereja berperan dengan benar untuk kesejahteraan Indonesia demi kemuliaan Allah.

#### 4. Kesimpulan

Gereja sebagai wujud kerajaan Allah di dunia tidak mempunyai pilihan untuk terlibat atau tidak terhadap bidang politik. Alkitab juga tidak menyajikan pilihan pada pilihan dimaksud. Alkitab justru memberi pengajaran bahwa pemerintahan adalah Hamba Allah (Rom.13), dan di dalamnya ada pengakuan bahwa orang-orang yang memerintah adalah atas seizin Allah. Dalam paradigma seperti itu maka gereja harus memberikan arah teologi yang pasti dalam bidang politik. Karena ranah politik sejatinya bukanlah area dosa atau pengingkaran terhadap kehendak Allah. Dengan memerankan diri sebagai penyuluh dan pengajar politik bagi jemaat maka diharapkan anggota gereja yang terlibat dalam politik praktis tidak lagi salah dalam memahami perannya di tengah masyarakat sebagai seorang politikus Kristen. Sebagai politikus Kristen jemaat akan menjadi tumpuan banyak orang dalam menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera.

#### Referensi

- Alim, Syahirul. "Membangun Toleransi Politik." *Kompasiana.Com*. Jakarta, April 20, 2020. <https://www.kompasiana.com/syahirulalimuzer/589c252920afbd31190aff/me-mbangun-toleransi-politik>.
- Azyumardi Azra. "Pemerintah Harus Tangkal Sektarianisme." *Satu Harapan*, 2014.
- Bolgherini, Silvia. "Participation." In *Hyperpolitics: An Interactive Dictionary of Political Science Concepts*, edited by Mauro Calise and Theodore J Lowi, 272. Chicago: University of Chicago Press, 2010.
- Coser, Lewis A. "Social Conflict and the Theory of Social Change." *The British Journal of Sociology* 8, no. 3 (1957): 197–297. [https://www.csun.edu/~snk1966/Lewis A Coser Social Conflict and the Theory of Social Change.pdf](https://www.csun.edu/~snk1966/Lewis%20A%20Coser%20Social%20Conflict%20and%20the%20Theory%20of%20Social%20Change.pdf).
- Fachrudin, Achmad. "Menyelamatkan Pemilih Pemula." *Detiknews.Com*, 2018.
- Gilbert, Kenyatta R. *A Pursued Justice: Black Preaching from the Great Migration to Civil Rights*. Texas: Baylor University Press, 2017.
- Hamzah, Amir. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Revisi. Malang: Literasi Nusantara, 2020.
- . *Metode Penelitian Kualitatif*. Malang: Literasi Nusantara, 2019.
- Hulst, Mary S. *Pedoman Khotbah Lengkap: Sepuluh Cara Praktis Untuk Khotbah Yang*

- Lebih Baik*. Jakarta: Waskita Publishing, 2018.
- Hutahaean, Hasahatan. "Tantangan Teologi Agama-Agama: Suatu Diskursus Model." *KURIOS (Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen)* 6, no. 2 (2020): 255–270. <https://www.sttpb.ac.id/e-journal/index.php/kurios/article/view/136/96>.
- Ikbar, Yanuar. *Metode Penelitian Sosial Kualitatif*. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Jati, Wasisto Raharjo. "AGAMA DAN POLITIK: TEOLOGI PEMBEBASAN SEBAGAI ARENA PROFETISASI AGAMA." *Walisongo: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan* 22, no. 1 (2014): 133–156. <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/walisongo/article/view/262>.
- Katimin, Katimin. *Politik Islam Indonesia: Membuka Tabir Perjuangan Islam Ideologis Dalam Sejarah Politik Nasional*. Medan: Perdana Publishing, 2018.
- Kristianto, Paulus Eko. "Merumuskan Etika Politik Kristen Dalam Era Gangguan Terorisme Di Indonesia." *DUNAMIS: Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristiani* 3, no. 2 (2019): 223–240. <https://sttintheos.ac.id/e-journal/index.php/dunamis/article/view/186/150>.
- Mahn, Jason A. *Becoming a Christian in Christendom: Radical Discipleship and the Way of the Cross in America's "Christian" Culture*. *Becoming A Christian in Christendom: Radical Discipleship and the Way of the Cross in America's "Christian" Culture*. Minneapolis: Fortress Press, 2016.
- Meeter, H. Henry. *Pandangan-Pandangan Dasar Calvinisme*. Edited by Irwan Tjulianto. Surabaya: Momentum, 2009.
- . *The Basic Ideas of Calvinism*. Grand Rapid Michigan: Baker Books, 1990.
- Meliala, Adrianus. *Pendampingan Politik*. Jakarta: OBOR, 2014.
- Mukhlis, Febri Hijroh. "Teologi Pancasila: Teologi Kerukunan Umat Beragama." *FIKRAH* 4, no. 2 (2016): 171–186. <https://journal.iainkudus.ac.id/index.php/fikrah/article/view/1885/pdf>.
- Patilima, Hamid. *Metode Penelitian Kualitatif*. Kelima. Jakarta: Cv. ALFABETA, 2016.
- Phelps, Hollis. *Jesus and the Politics of Mammon (Critical Theory and Biblical Studies)*. New York: Cascade Books, 2019.
- Rachman, Rasid. "Teologi Sosial-Politik-Budaya." In *Teologi-Teologi Kontemporer*, 117–145. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2018.
- Rantung, Dr. Djoys Anneke. "TEOLOGI POLITIK UNTUK KEADILAN Respons Teologis Gereja Di Tengah Menguatnya Politik Identitas." *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama* 2, no. 1 (2019): 1–11. <https://jurnalvow.sttwmi.ac.id/index.php/jvow/article/view/21>.
- Rourke, Francis E. "Responsiveness and Neutral Competence in American Bureaucracy."

- In *Democracy, Bureaucracy, and the Study of Administration*, edited by Camilla Stivers, 199–216. 1st Editio. Routledge, 2019.
- Saputra, Kurniawan Eka. *Dinamika Politik Lokal*. Bandung: PT Lontar Digital Asia, 2020.
- Simamora, Adolf Bastian. "POLITIK MENURUT ALKITAB DAN IMPLIKASINYA BAGI PERAN GEREJA DALAM PUSARAN POLITIK DI INDONESIA." *Voice of Wesley: Jurnal Ilmiah Musik dan Agama* 2, no. 1 (2019): 1–15.  
<https://jurnalvow.sttwmi.ac.id/index.php/jvow/article/view/16/16>.
- Sirait, Saut Hamonangan. *Politik Kristen Di Indonesia Suatu Tinjauan Etis*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2012.
- Surbakti, Ramlan, and Hari Fitrianto. *Ide-Ide Politik Alternatif Dan Globalisasi Di Negara Berkembang*. Surabaya: CV. Revka Prima Media, 2012.
- Susanto, Herry. "Panggilan Sosial Gereja Berdasarkan Pelayanan Yesus Dalam Lukas 4:18-19: Sebuah Upaya Merevitalisasi Pelayanan Gereja." *Veritas: Jurnal Teologi dan Pelayanan* 19, no. 1 (2020): 97–112.  
<https://ojs.seabs.ac.id/index.php/Veritas/article/view/356>.
- Wowor, Alter I. "Teologi Dan Etika Politik Dalam Gereja Di Zaman Post-Modern." *BIA': Jurnal Teologi dan Pendidikan Kristen Kontekstual* 1, no. 1 (2018): 112–123.  
<https://www.jurnalbia.com/index.php/bia/article/view/23/9>.
- Zuhro, R Siti. "Demokrasi Dan Pemilu Presiden 2019." *Jurnal Penelitian Politik* 16, no. 1 (2019): 69–81.  
<http://ejournal.politik.lipi.go.id/index.php/jpp/article/view/782/541>.